

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian dan Angga Sukma Dhaniswara. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat P2Humas KPDJP.
- Bunyamin, Puspahadi dan Irwan Wisanggeni. (2019). *Current Issues Perpajakan*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Gunadi . (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Judisseno, K. Rimsy. (2004). *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Permadi, Haris. (2022, 01 Desember). *PPh Pasal 21 Progresif*. Diambil kembali dari [KMS:: PPh pasal 21 Progresif \(kemenkeu.go.id\)](https://kms.kemenkeu.go.id)
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti . (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sumatriani, Muhammad Iqbal, dan Dian Pane. (2023). *Perpajakan Untuk Vokasi*. Klaten: Nasmedia.
- Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. (2020). *Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan*. Sumatera Selatan.
- Yahya, Adibah, Rina Nurjanah, dan Shella Gilby Sapulette. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Diperbanyak oleh Ortax.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Diperbanyak oleh Ortax.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.